BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Kewenangan KPU dengan Bawaslu terjadi perbedaan penafsiran pada proses pendaftaran bacaleg 2019 yakni disebabkan karena beberapa hal berikut ini : (1) Benturan penafsiran terhadap tugas, wewenang, dan peraturan yang ada. (2) Tidak ada itikad baik antara KPU dan Bawaslu. (3) Penegakan Kode Etik yang belum maksimal.
2. Konsep ideal kewenangan Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu yakni dengan membuat beberapa hal sebagai berikut : (1) Rekonstruksi Kode Etik. (2) Penyamaan pandangan dan bikin kesepakatan bersama antara Bawaslu dan KPU. (3) solusi alternatif jangka panjang yakni dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

B. SARAN

1. KPU dan Bawaslu merupakan ujung tombak utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas. Setiap peraturan dan keputusan yang dikeluarkan haruslah berdasarkan pada konstitusi yang mengatur serta tidak boleh ada lagi benturan penafsiran antara kedua lembaga negara ini dalam pelaksanaan tugas dan

wewenangnya dalam rangka menjalankan amanat undang-undang. Selain itu apabila pada pemilu kedepan masing terulang kondisi seperti ini, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi harus mampu menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya suatu putusan MK agar kedua lembaga penyelenggara pemilu ini dapat berjalan semestinya sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadinya perbedaan penafsiran dan konflik kewenangan.

2. Dalam penyelenggaraan pemilu kedepan khususnya pada proses pendaftaran, sebaiknya KPU dan Bawaslu bertikad baik untuk bertemu dalam rangka melakukan penyamaan pandangan terhadap peraturan yang ada baik terhadap bunyi penafsiran undang-undang pemilu, peraturan KPU, peraturan DKPP, serta tugas dan wewenang kedua lembaga negara ini. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut harus dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) sebagai bentuk kesepakatan yang wajib dijalankan.